

	News Title : Bappebti Gandeng OJK Dan Kemenkeu Susun RPP Transaksi Kripto	
	Media Name : Akurat.co	Journalist : Petrus C. Vianney
	Publish Date : 20 January 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 1,500,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag))	
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Pengawasan Kripto

EKONOMI

Bappebti Gandeng OJK Dan Kemenkeu Susun RPP Transaksi Kripto

Petrus C. Vianney | © Jumat, 20 Januari 2023 | 19:50 wib



Ilustrasi kripto (lovemoney.com)

AKURAT.CO Plt Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Didid Noordiatmoko mengungkapkan, pihaknya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait kewenangan transisi pengalihan aset kripto.

RPP terkait transisi ini akan disusun paling lambat selama 6 bulan. Adapun masa transisi akan dilakukan selama 2 tahun.

"Butir yang akan dimasukkan dalam RPP ini terkait mekanisme pemindahan, mekanisme kerja sama, dan sinergi antara Bappebti, OJK, dan Kementerian Keuangan," kata Didid dalam penutupan Rapat Kerja Bappebti, di kawasan Senen, Jakarta Pusat Jumat (20/1/2023).

baca juga:

[7 Tips Dari Kemendag Agar Produk Kamu Diterima Di Negara Tujuan Ekspor](#)

[Mendag Dorong Pelaku UMKM Lewat 4 Pilar Peningkatan Daya Saing](#)

[Bappebti Targetkan CPO Masuk Bursa Pada Juni 2023](#)

Adapun, kata Didid, peran OJK nantinya terkait kebijakan operasional dari aset kripto. Sedangkan Bappebti terkait koordinasi kebijakan aset digital.

"Bisa dibilang Bappebti mengurus regulasi secara makro. Ilustrasinya seperti asuransi, kebijakan operasionalnya ada di OJK, tetapi kebijakan besarnya ada di Kementerian Keuangan," ujar Didid. □